



# Semanggi

Kabar FRAKSI PKS DPRD KOTA SURABAYA



## Satgas nti Pr manism ,

F-PKS SURABAYA TAK  
BOLEH ABAIKAN  
FUNGSI SATPOL PP  
DAN BAKESBANGPOL



CLICK HERE ✨



## turan aru, P ng mbang i Surabaya

WAJIB BANGUN BOZEM 3  
METER KUBIK TIAP 100  
METER LAHAN



CLICK HERE ✨



## DPRD Surabaya Dorong UMKM

MAKSIMALKAN  
LONJAKAN  
WISATAWAN SAAT  
LIBUR NATAL 2025



CLICK HERE ✨



## Libur Nataru,

JOHARI  
MUSTAWAN  
INGATKAN  
PUSKESMAS  
TETAP  
BEROPERASI



CLICK HERE ✨



## Komisi C DPRD Dukung

PEMBERANTASAN  
PUNGLI DI  
LINGKUNGAN  
DISHUB

CLICK HERE ✨



pkspdprdsurabaya



pkstvdprdsurabaya



fraksi.pks-surabaya.or.id





# Satgas Anti Premanisme,

F-PKS SURABAYA  
TAK BOLEH  
ABAIKAN FUNGSI  
SATPOL PP DAN  
BAKESBANGPOL



**Cahyo Siswo Utomo, ST., MH.**  
Ketua Fraksi PKS & Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya, JatimUPdate.id - Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo buka suara terkait inisiatif Pemkot untuk membentuk Satgas Anti Premanisme, pasca mencuatnya kasus nenek Elina.

Cahyo memaparkan, kendati tanpa satgas, perlindungan warga merupakan tanggung jawab OPD berwenang di lingkungan Pemkot Surabaya.

"Secara struktural, fungsi penertiban dan perlindungan warga sebenarnya sudah melekat dan berjalan pada OPD seperti Satpol PP, Bakesbangpol, serta perangkat kewilayahan." tutur Cahyo kepada Jatimupdate.id, Rabu (31/12).

Cahyo menekankan, pembentukan Satgas Anti Premanisme tidak mengabaikan fungsi dan tanggung jawab OPD tersebut.

Begitu juga dengan insiden nenek Elina, dari sudut pandangnya kasus itu tidak dapat ditangani secara sektoral.

“

**Fungsi tersebut tentu tidak boleh diabaikan. Namun, kasus yang menimpa Nenek Elina menunjukkan bahwa persoalan premanisme tidak dapat ditangani secara sektoral." jelas Cahyo.**



Pasalnya sebut Cahyo terdapat aspek keamanan, sosial, serta potensi konflik horizontal.

Sehingga beber anggota Komisi A DPRD Surabaya tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi.

"Karena itu, kami memandang pembentukan Satgas Anti-Preman perlu ditempatkan sebagai langkah penguatan koordinasi lintas instansi yang terpadu, bukan hanya solusi instan atau reaktif terhadap satu kasus tertentu." jelas Cahyo.

Maka dari itu, ia menekankan Satgas Anti Premanisme tidak cuma berfungsi sebagai pencegahan.

Namun kata Cahyo juga mampu melaksanakan fungsi penindakan.

"Satgas ini penting tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga untuk pencegahan." urai Cahyo.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban Pemkot Surabaya akan membentuk Satgas Anti Premanisme.

Satgas ini melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan para pemimpin suku di Kota Surabaya.

"Maka, hari ini tidak ada lagi premanisme di Kota Surabaya. Kita harus berani melawan premanisme. Kita harus satu, tapi dengan sisi hukum yang berjalan," katanya.





# Aturan Baru, Pengembang di Surabaya

WAJIB BANGUN  
BOZEM 3 METER  
KUBIK TIAP 100  
METER LAHAN



**Hj. Aning Rahmawati, S.T.**  
Wakil Ketua Komisi C - DPRD Kota Surabaya  
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya



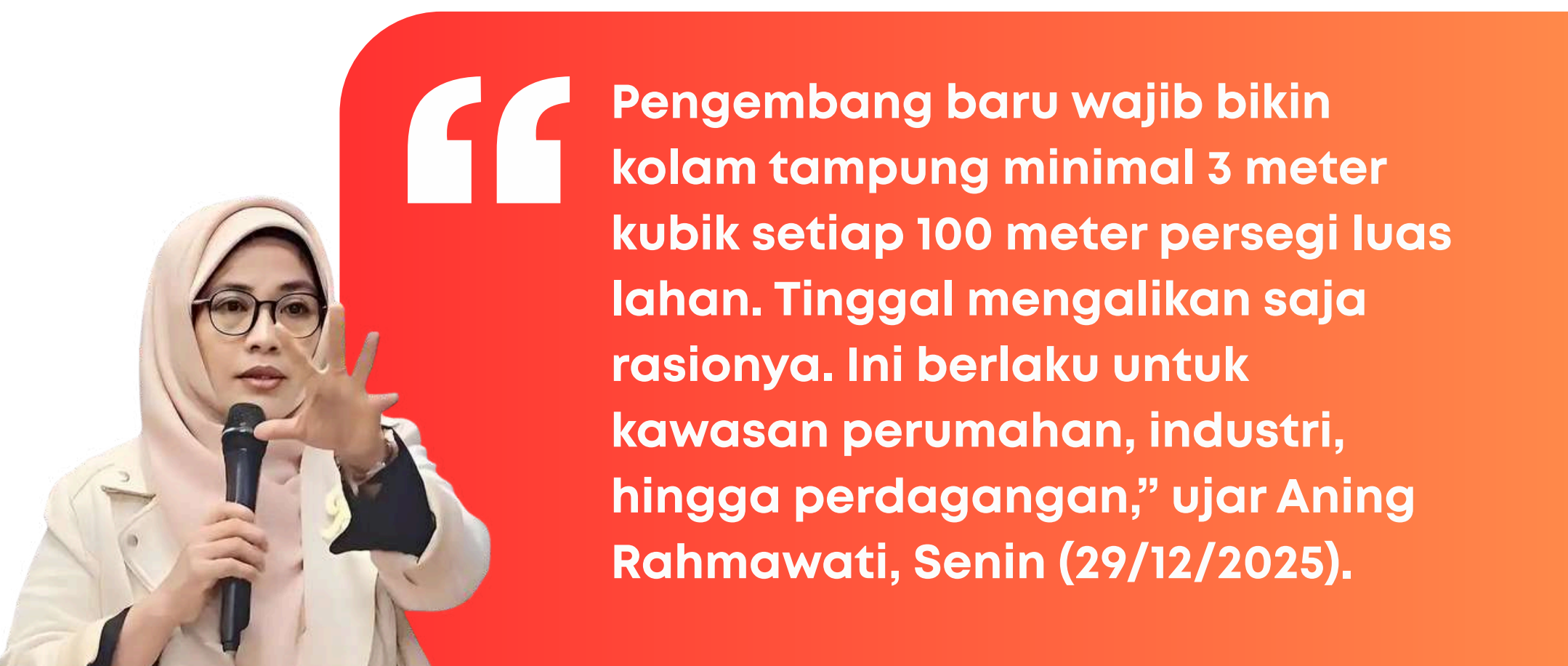
SURYA.CO.ID, SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), tengah mematangkan Raperda Pengendalian Banjir sebagai payung hukum komprehensif, untuk mengatasi persoalan genangan di Kota Pahlawan.

Salah satu poin krusial yang disepakati, adalah kewajiban bagi setiap pengembang kawasan untuk menyediakan kolam tampung air atau bozem.

Langkah ini diambil, untuk memastikan setiap pembangunan baru di Surabaya memiliki sistem resapan yang mandiri, sehingga tidak membebani saluran drainase kota secara berlebihan.

Kewajiban Bozem bagi Kawasan Industri dan Perumahan  
Wakil Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Banjir, Aning Rahmawati, menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha atau developer wajib menyediakan ruang resapan air dengan ukuran yang telah ditentukan.

Aturan ini tidak hanya menyasar perumahan, tetapi juga kawasan industri dan perdagangan.



**Pengembang baru wajib bikin kolam tampung minimal 3 meter kubik setiap 100 meter persegi luas lahan. Tinggal mengalikan saja rasionya. Ini berlaku untuk kawasan perumahan, industri, hingga perdagangan,” ujar Aning Rahmawati, Senin (29/12/2025).**

Pemkot Surabaya Wajib Siapkan Resapan 30 Persen di RTH  
Tidak hanya bagi pihak swasta, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga dibebani kewajiban serupa dalam mengelola aset daerah.

Dalam raperda tersebut, Pemkot Surabaya diwajibkan menyediakan ruang resapan air minimal 30 persen dari total luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola.

Hal ini bertujuan, agar taman-taman kota tidak hanya berfungsi secara estetika dan ekologi udara, tetapi juga menjadi penyerap debit air hujan yang efektif untuk mencegah banjir rob maupun banjir kiriman.

## Terobosan Kewenangan Pengelolaan Sungai

Selama ini, upaya pembersihan atau normalisasi sungai di Surabaya sering terhambat oleh perbedaan kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, Jasa Tirta hingga Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Raperda tersebut hadir, untuk memberikan kepastian hukum melalui pasal kerja sama lintas instansi.

“

Nantinya Pemkot Surabaya diberi ruang hukum untuk tetap melakukan penanganan banjir pada sungai-sungai yang kewenangannya berada di tingkat provinsi maupun pusat. Tidak boleh ada lagi hambatan administrasi saat penanganan darurat dibutuhkan,” tegas politisi PKS tersebut.



## Solusi Permanen Banjir Rob dan Drainase

Selain mengatur soal bozem, regulasi ini juga memerintahkan pembangunan drainase secara sistematis berdasarkan kriteria teknis yang jelas, bukan lagi bersifat sporadis.

Untuk menangani banjir rob di wilayah pesisir, raperda mewajibkan pembangunan tanggul yang disertai dengan pintu air, bozem serta pompa pada setiap saluran primer yang bermuara ke laut atau sungai besar.

Dengan finalisasi pasal-pasal teknis ini, DPRD berharap Raperda Pengendalian Banjir dapat segera disahkan menjadi Perda untuk memperkuat langkah mitigasi bencana di Surabaya.

# DPRD Surabaya Dorong UMKM

MAKSIMALKAN LONJAKAN  
WISATAWAN SAAT LIBUR  
NATAL 2025



**Hj. Enny Minarsih**

Anggota Komisi B, Ketua BAPEMPERDA &  
Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya



SURABAYA – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya selama libur Natal 2025 menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Dewan menilai, peningkatan arus wisatawan yang mencapai ratusan ribu orang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan perekonomian lokal, khususnya sektor UMKM.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Enny Minarsih, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), jumlah wisatawan yang masuk ke Surabaya selama libur Natal 2025 tercatat menembus angka sekitar 500 ribu orang.

SURABAYA – Lonjakan kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya selama libur Natal 2025 menjadi perhatian serius DPRD Surabaya. Dewan menilai, peningkatan arus wisatawan yang mencapai ratusan ribu orang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menggerakkan perekonomian lokal, khususnya sektor UMKM.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Enny Minarsih, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), jumlah wisatawan yang masuk ke Surabaya selama libur Natal 2025 tercatat menembus angka sekitar 500 ribu orang.

“Produk UMKM Surabaya sebenarnya sudah banyak masuk ke mal, hotel, restoran, hingga ritel modern. Ini harus terus diperluas dan diperkuat,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang aktif mempromosikan produk UMKM lokal ke berbagai hotel dan pusat perbelanjaan, sehingga produk UMKM Surabaya semakin dikenal dan berpeluang naik kelas.



**Produk UMKM Surabaya  
sebenarnya sudah banyak masuk  
ke mal, hotel, restoran, hingga ritel  
modern. Ini harus terus diperluas  
dan diperkuat,” jelasnya.**

Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya melalui siaran pers Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) mencatat adanya peningkatan signifikan jumlah kunjungan wisatawan selama libur Natal 2025.

Kepala Disbudporapar Kota Surabaya, Hidayat Syah, menyebutkan bahwa total wisatawan yang masuk ke Surabaya mencapai sekitar 500 ribu orang, dengan pusat perbelanjaan menjadi salah satu tujuan utama wisatawan.

Lonjakan tersebut, menurut DPRD Surabaya, harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan UMKM agar sektor pariwisata benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. (dims)





# Libur Nataru,

JOHARI  
MUSTAWAN  
INGATKAN  
PUSKESMAS  
TETAP  
BEROPERASI

**H. Johari Mustawan, S.T.P., M.A.R.S.**

Komisi D DPRD Kota Surabaya - Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya



Surabaya, newrespublika-Anggota Komisi D DPRD Surabaya dari PKS, Johari Mustawan mengingatkan kepada Puskesmas di Surabaya tetap beroperasi seperti biasa meski ada libur panjang natal dan tahun baru.

Johari Mustawan mengatakan, kalau di dunia bidang kesehatan bahwa layanan kesehatan itu layanan termasuk layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat 24 jam sehari.

“Sehingga walaupun mungkin dalam kondisi libur panjang, diharapkan Puskesmas tetap bisa melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Johari Mustawan yang biasa disapa Bang Jo di Surabaya, Rabu (24/12/2025).

Ia menambahkan, meskipun libur, termasuk juga rumah sakit-rumah sakit, yang pertama kalau rumah sakit punya Instalasi Gawat Darurat (IGD), sementara di puskesmas memiliki Unit Gawat Darurat (UGD).

Karena, kata Bang Jo, beda antara instalasi dan unit, tetapi di puskesmas cukup unit gawat darurat. Seperti itu, intinya bisa melayani pasien-pasien emergensi yang terjadi ketika kondisi libur panjang tersebut.

Kalau misalkan, sambung Bang Jo, karena ada keterbatasan tenaga kesehatan atau tenaga medis dalam masa libur panjang yang sebagian cuti maka harus ada sistem yang mengatur Faskes (Fasilitas Kesehatan) yang bisa tetap beroperasi.



**Khususnya Faskes 24 jam di 23 Puskesmas di Surabaya itu bisa meng-cover kebutuhan masyarakat Surabaya, selama libur panjang natal dan tahun baru,”terang mantan Ketua PKS Kota Surabaya.**



Kemudian, sambung Bang Jo, untuk Puskesmas-Puskesmas yang sulit dijangkau oleh masyarakat maka bisa kerjasama dengan rumah sakit, maupun klinik-klinik swasta.

Umumnya, jelas Bang Jo, klinik-klinik swasta biasanya melaporkan kondisi libur atau tidaknya, dalam masa liburan itu baik itu kepada jenis kesehatan maupun kepada puskesmas kesehatan.



Supaya, kembali sambung Bang Jo, ketika selama liburan itu para peserta puskesmas yang ter-cover peserta jaminana kesehatannya di puskesmas tersebut atau di klinik swasta tersebut, maka dia harus teralihkan bisa di puskesmas lain yang buka 24 jam.

Atau, terang Bang Jo, di rumah sakit dengan pasien tanpa membayar untuk peserta yang terdaftar di Puskesmas. Jangan sampai ketika pasien tetap membayar untuk peserta Puskesmas tersebut hanya karena dialihkan maka Puskesmas ataupun rumah sakit yang melayani peserta BPJS yang tidak ter-cover di puskesmasnya, lalu meminta dana itu tidak boleh.

“Tapi harus ada kerjasama sendiri secara terpisah antara Puskesmas dengan rumah sakit,”ungkap politisi PKS Kota Surabaya ini.

Bang Jo menegaskan, secara umum kita tetap harus memastikan sistem layanan kesehatan di Puskesmas 24 jam sehari. Hanya memang karena tadi misalkan dihadapkan pada kondisi tertentu. Misalkan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan juga jumlah tenaga medis atau dokter.

Himbauan kami di Komisi D, kata Bang Jo, Puskesmas yang tidak beroperasi selama Nataru karena tenaga medisnya libur, maka bisa dialihkan ke Puskesmas yang buka.

Oleh karena itu, tetap harus ada sistem yang memastikan bahwa masyarakat tetap terlayani selama 24 jam. Baik itu di Puskesmas tersebut atau kalau Puskesmasnya misalkan terpaksa tutup maka harus kerjasama dengan puskesmas lain yang buka 24 jam.

Atau rumah sakit atau klinik swasta yang 24 jam dengan pasien tetap tidak boleh membayar untuk peserta BPJS kepada layanan yang dialihkan dan itu harus disosialisasikan, harus tertempel di puskesmas tersebut atau di klinik swasta tersebut.

**“Bahwa selama liburan mereka mengalihkan ke Puskesmas mana itu harus tercantum dalam pengumuman dan sosialisasikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang terdata di Faskes kesehatan primer tersebut,”pungkasnya.(trs)**







# Komisi C DPRD Dukung

PEMBERANTASAN  
PUNGLI DI  
LINGKUNGAN  
DISHUB



**H. Faris Abidin, S.Pi.**

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya  
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya



SURABAYA (Lentera) – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendukung penuh langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam mencegah dan memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub).

Hal ini dilakukan, usai adanya penipuan berkedok rekrutmen kerja yang dilakukan oleh salah satu oknum pada layanan transportasi wara-wiri milik Pemkot Surabaya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Faris Abidin, mengungkapkan, DPRD berkomitmen untuk bersinergi dengan pihak eksekutif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Sebagai wakil rakyat, kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan eksekutif dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Semua harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdaya guna,” ungkap Faris, Senin (5/1/2026).

Ia menambahkan, DPRD bersama Pemkot Surabaya masih memiliki tanggung jawab besar dalam mensejahterakan masyarakat, sekaligus menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif tanpa adanya konspirasi, khususnya dalam proses rekrutmen driver dan helper Bus Suroboyo.

Menurutnya, proses perekrutan harus dilakukan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa dipungut biaya apa pun. “Semua warga boleh mendaftarkan diri selama memenuhi persyaratan. Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun,” tuturnya.

Politisi dari Fraksi PKS ini juga menekankan, apabila ditemukan pelanggaran dalam proses tersebut, maka harus diarahkan ke proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Komisi C DPRD Surabaya turut menyoroti perilaku sebagian sopir Bus Suroboyo yang dinilai ugal-ugalan di jalan. Ia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh serta pemanggilan terhadap dinas terkait.

“

**Kami menggarisbawahi perlunya evaluasi dan pemanggilan kepada dinas terkait. Kami juga meminta penjelasan mengenai mekanisme perekrutan, apakah sudah sesuai dengan standar operasional pelayanan,” katanya.**



Apabila ditemukan celah atau kesalahan dalam sistem yang ada, Faris meminta agar segera diambil langkah preventif maupun represif demi menjaga keselamatan penumpang.

"Evaluasi harus dilakukan secara rutin, baik terhadap kelayakan armada maupun kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam operasional Bus Suroboyo," tutup Faris. (\*)

Ia menambahkan, “Tema pembangunan tahun 2026, yaitu transformasi sosial ekonomi berkelanjutan melalui penguatan modal manusia dan pembangunan infrastruktur, menandai tekad kuat Surabaya untuk tetap tegak di tengah kondisi ekonomi yang menantang.”

Faris juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya pada 2024 berada di angka 84,69. Kami berharap dengan penguatan modal manusia, angka ini dapat meningkat di tahun 2026,” ujarnya.

Ia mengapresiasi peningkatan penerima program Beasiswa Pemuda Tangguh dari 5.700 menjadi 24.000 mahasiswa, serta program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana yang dinilai mampu mendorong mobilitas sosial masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS juga menilai pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan. “Penduduk miskin ekstrem memang sudah tidak ada di Kota Surabaya, tetapi masih ada keluarga rentan miskin yang perlu pendampingan dan modal bergulir bagi UMKM,” ujar Faris.

Ia juga mendorong berdirinya BUMD Aset untuk mengoptimalkan pengelolaan aset Pemkot serta peningkatan transportasi massal.

“

**Transportasi yang murah, cepat, aman, dan nyaman harus menjadi prioritas. Kami mendorong agar anggaran transportasi massal ditingkatkan dua persen dari APBD,” tegasnya.**



Menanggapi pandangan fraksi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuturkan, “Kami sepakat, pengurangan transfer keuangan daerah tidak boleh mengurangi program-program yang sudah berjalan. Kita harus punya skala prioritas yang semuanya berpihak pada rakyat.”

Ia menegaskan, “Pemotongan transfer daerah memang membuat kita harus selektif, tetapi jangan pernah menghilangkan program kerakyatan. Semua harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.”

Eri menambahkan, “Dengan memanfaatkan aset dan mempercepat pembangunan infrastruktur, kita bisa meningkatkan pendapatan daerah, termasuk dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).” Ia juga mengumumkan rencana Great Sale Surabaya pada Desember mendatang untuk menggairahkan sektor perdagangan dan pariwisata. (q cox, Fred)



# Majalah Digital *Semanggi*



**FRAKSI PKS** DPRD KOTA SURABAYA

update selalu di media sosial kami

   **pkspdprdsurabaya**

 **pkstvdprdsurabaya**

 **fraksi.pks-surabaya.or.id**